

ABSTRAK

Agung Alpajar (1193030004). Implementasi Sistem Pelayanan Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Kasus Di Kelurahan Cisaranten Kulon).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya kelompok rentan dan miskin, serta relevansi nilai-nilai Islam dalam membentuk kebijakan publik yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta menganalisisnya melalui perspektif siyasah maliyah (kebijakan keuangan dalam Islam), dengan fokus studi kasus di Kelurahan Cisaranten Kulon, Kota Bandung.

Terdapat tiga teori utama dalam penelitian ini, yaitu teori negara kesejahteraan untuk menjelaskan peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, teori implementasi kebijakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 di tingkat lokal, dan teori siyasah maliyah sebagai perspektif Islam dalam melihat keadilan distribusi dan pengelolaan keuangan publik. Ketiganya membentuk kerangka analisis yang saling melengkapi dalam mengkaji kebijakan kesejahteraan sosial di Kelurahan Cisaranten Kulon.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparatur kelurahan serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggabungkan pendekatan normatif (analisis isi Undang-Undang) dan pendekatan konseptual keislaman melalui kerangka siyasah maliyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesejahteraan sosial di Kelurahan Cisaranten Kulon telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, terutama dalam hal pelayanan dasar, pemberdayaan sosial, serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam perspektif siyasah maliyah, sistem ini sudah mengarah pada prinsip kemaslahatan, distribusi yang adil, dan pengelolaan dana publik secara amanah, namun implementasinya masih belum maksimal dalam mencerminkan nilai-nilai tersebut secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, Siyasah Maliyah, Cisaranten Kulon, Pelayanan Sosial, Kebijakan Publik Islam*

ABSTRACT

Agung Alpajar 1193030004 IMPLEMENTATION OF SOCIAL WELFARE SERVICE AND DEVELOPMENT SYSTEM ACCORDING TO LAW NO. 11 OF 2009 ON SOCIAL WELFARE FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH MALIYAH (Case Study in Cisaranten Kulon Village)

This research is motivated by the importance of the government's role in ensuring the social welfare of the community, especially vulnerable and poor groups, as well as the relevance of Islamic values in forming fair and welfare-oriented public policies.

The purpose of this study is to examine the social welfare service and development system based on Law Number 11 of 2009 on Social Welfare, and to analyze it through the perspective of siyasah maliyah (financial policy in Islam), with a focus on case studies in Cisaranten Kulon Village, Bandung City.

There are three main theories in this study, namely the welfare state theory to explain the role of the state in ensuring people's welfare, the policy implementation theory to assess the effectiveness of the implementation of Law Number 11 of 2009 at the local level, and the siyasah maliyah theory as an Islamic perspective in viewing the justice of distribution and management of public finances. The three form a complementary analytical framework in examining social welfare policies in Cisaranten Kulon Village.

The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews with village officials and documentation studies of laws and regulations and related literature. The data obtained are analyzed by combining a normative approach (analysis of the contents of the Law) and an Islamic conceptual approach through the siyasah maliyah framework.

The results of the study indicate that the social welfare service system in Cisaranten Kulon Village has referred to the provisions of Law Number 11 of 2009, especially in terms of basic services, social empowerment, and handling of people with social welfare problems (PMKS). However, in practice, various obstacles are still found such as limited resources, less than optimal cross-institutional coordination, and low community participation in the policy-making process. From the perspective of siyasah maliyah, this system has been directed towards the principles of welfare, fair distribution, and management of public funds in a trustworthy manner, but its implementation has not been optimal in reflecting these values as a whole.

Kata Kunci: Social Welfare, Law No. 11 of 2009, Siyasah Maliyah, Cisaranten Kulon, Social Services, Islamic Public Policy